



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI XIII DPR RI  
(BIDANG: HUKUM dan HAM)**

Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kementerian Sekretaris Negara; Kantor Staf Presiden; Komnas HAM; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Sekretariat Jenderal MPR RI; Sekretariat Jenderal DPD RI;

---

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Persidangan	: I
Rapat	: Ke – 9 (Sembilan)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Sekretaris Negara
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: FRabu, 13 November 2024
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II Lantai 2
Acara	: 1. Perkenalan Komisi XIII dengan Menteri Sekretaris Negara 2. Hubungan Mitra Kerja dengan Komisi XIII DPR RI 3. Lain-lain
Ketua Rapat	: Willy Aditya (Ketua Komisi XIII DPR RI/ F.P Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Sartomo, S.S., M.Si
Hadir	: A. Pemerintah - Menteri Sekretaris Negara dan jajaran B. 23 Orang Anggota dari 41 Orang Anggota Komisi XIII DPR RI terdiri dari: Izin 18 Orang Anggota Komisi XIII DPR RI

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI pada Rabu, 13 November 2024 dibuka pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Willy Aditya selaku Ketua Rapat Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara, adalah:
  - a. Perkenalan Pimpinan dan Anggota Komisi XIII dengan Menteri Sekretaris Negara dan jajarannya;
  - b. Hubungan Mitra Kerja dengan Komisi XIII DPR RI
  - c. Lain-lain

## **II. KESIMPULAN RAPAT**

1. Komisi XIII DPR RI mendukung program prioritas penguatan kelembagaan Kementerian Sekretariat Negara sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Komisi XIII DPR RI mendukung penyelesaian proses integrasi Sekretariat Kabinet sebagaimana amanat Perpres Nomor 139 Tahun 2024.
3. Komisi XIII DPR RI meminta Menteri Sekretaris Negara untuk mengajukan dan memfasilitasi Kementerian dan Lembaga untuk kelengkapan payung hukum pada revisi Perpres ataupun penyempurnaan yakni :
  - a. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021
  - b. Keputusan Kemenpolkam nomor 11 tahun 2024 yang akan berakhir pada Desember 2024

Kedua peraturan tersebut adalah payung hukum BNPT.

4. Komisi XIII DPR RI meminta Mensesneg untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan Kementerian terkait perihal Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pengajuan Peraturan Pemerintah tentang pelayanan hak warga binaan dan tahanan sebagai implementasi dari Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. (fakultatif dengan Kementerian terkait)

5. Komisi XIII DPR RI mengapresiasi dan mendukung usulan Kementerian Sekretariat Negara atas tambahan pagu anggaran tahun 2025 sebagai konsekuensi atas integrasi Sekretariat Kabinet dan beberapa lembaga/badan baru ke Kementerian Sekretariat Negara.
6. Komisi XIII DPR RI meminta Menteri Sekretaris Negara untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi XIII paling lambat tanggal 18 November 2024.

7. **PENUTUP**

Rapat ditutup Pukul 12.00 WIB

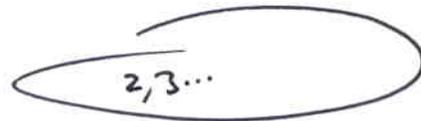
Jakarta, 13 November 2024

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA**

**KETUA RAPAT,**



PRASETYO HADI



WILLY ADITYA  
A-404